

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1.1. Perkembangan PAD, Dana Perimbangan, PDRB, Jumlah Penduduk, IPM dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019

##### 1.1.1. Pertumbuhan PAD Kabupaten Bungo

Perkembangan PAD Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1. Perkembangan PAD Kabupaten Bungo Tahun 2004-2019**

Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	Perkembangan (%)
2004	20.281.712	-
2005	22.244.318	9,68
2006	24.506.187	10,17
2007	37.890.791	54,62
2008	64.573.143	70,42
2009	59.006.321	-8,62
2010	46.664.510	-20,92
2011	61.175.415	31,10
2012	64.281.003	5,08
2013	80.201.122	24,77
2014	100.637.770	25,48
2015	107.128.087	6,45
2016	130.637.770	21,95
2017	114.818.208	-12,11
2018	183.133.679	59,50
2019	133.848.451	-26,91
Rata-Rata	78.189.280,	16,71

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (2019)

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa selama tahun 2004-2019 rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bungo adalah Rp.78.189.280 dengan rata-rata perkembangan sebesar 16,71%. Tahun 2004-2005 PAD Kabupaten Bungo mengalami perkembangan sebesar 9,68% atau dari Rp.20.281.712 juta menjadi Rp.22.244.318.

Tahun 2006 PAD Kabupaten Bungo kembali meningkat sebesar 10,17% bahkan sampai tahun 2008 PAD Kabupaten Bungo terus meningkat sebesar 70,4%. Akan tetapi tahun 2009 sampai tahun 2010 PAD Kabupaten Bungo justru mengalami penurunan sebesar 20,92%. Hal ini diduga karena adanya penurunan dari sumber-sumber PAD Kabupaten Bungo sebagai akibat adanya inflasi, penambahan jumlah penduduk maupun adanya peningkatan pengeluaran pemerintah.

Tahun 2011 PAD Kabupaten Bungo justru mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 31,10% dan ditahun 2012 hanya terjadi pertumbuhan yang sedikit yaitu 5,08%. PAD Kabupaten Bungo terus mengalami peningkatan sampai tahun 2016 dengan perkembangan sebesar 21,95%. Hal ini diduga karena pemerintah Kabupaten Bungo dapat memanfaatkan segala potensi yang ada pada waktu tersebut sehingga sumber pendapatan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bungo.

Selanjutnya tahun 2017 sampai tahun 2019 PAD Kabupaten Bungo justru mengalami fluktuasi, dimana tahun 2017 PAD Kabupaten Bungo menurun sebesar 12,11% dan tahun 2018 PAD Kabupaten Bungo kembali meningkat sebesar 59,50%. Kemudian di tahun 2019 PAD Kabupaten Bungo justru kembali menurun sebesar 26,91% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini diduga karena sumber PAD Kabupaten Bungo kurang stabil sehingga berdampak pada naik turunnya PAD Kabupaten Bungo.

Menurut Hartoyo (2017) naik turunnya PAD suatu daerah dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relative rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan kualitas SDM aparatur,

kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan program serta ketidakooptimisan akan hasil yang mungkin dicapai.

### 1.1.2. Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Bungo

Adapun perkembangan dana perimbangan Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 sebagai berikut:

**Tabel 5.2. Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Bungo Tahun 2004-2019**

Tahun	Dana Perimbangan (Ribu Rp)	Perkembangan (%)
2004	188.728.380	-
2005	223.508.999	18,43
2006	287.009.189	28,41
2007	351.297.654	22,40
2008	414.953.971	18,12
2009	435.291.642	4,90
2010	473.509.789	8,78
2011	529.100.111	11,74
2012	620.450.179	17,27
2013	714.327.809	15,13
2014	750.931.280	5,12
2015	768.951.280	2,40
2016	908.141.477	18,10
2017	812.254.037	-10,56
2018	909.063.378	11,92
2019	870.897.135	-4,20
Rata-Rata	578.651.019	11,20

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan BPS Kabupaten Bungo (2019)

Tabel 5.2. menunjukkan bahwa rata-rata dana perimbangan Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 sebesar Rp.578.651.019 dengan rata-rata perkembangan sebesar 11,20%. Dana perimbangan Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2004-2005 dana perimbangan Kabupaten Bungo meningkat sebesar 18,43%.

Tahun 2006 dana perimbangan Kabupaten Bungo meningkat sebesar 28,41% sampai tahun 2007 dengan peningkatan sebesar 22,40%. Pada tahun 2008 dan tahun 2009 dana perimbangan Kabupaten Bungo hanya sedikit mengalami peningkatan yaitu 18,12% pada tahun 2008 dan 4,90%

di tahun 2009. Kemudian tahun 2010 sampai 2016 dana perimbangan Kabupaten Bungo terus meningkat dengan angka perkembangan sebesar 18,10%. Hal ini diduga selama tahun 2004 sampai 2010 peningkatan dana ke daerah-daerah di wilayah Indonesia mengalami peningkatan dan mekanisme pencairannya yang semakin efektif. Kondisi ini dikarenakan adanya kebijakan desentralisasi fiskal, dana transfer ke daerah dan dana pusat yang mengalir ke daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Meskipun demikian, di tahun 2017 dana perimbangan Kabupaten Bungo mengalami penurunan sebesar 10,56% dan kembali meningkat sebesar 11,92% di tahun 2018. Tahun 2019 dana perimbangan Kabupaten Bungo justru kembali mengalami penurunan meskipun hanya sedikit yaitu 4,20%. Penyebab dari naik turunnya dana perimbangan Kabupaten Bungo pada tahun 2017 sampai 2019 diduga karena adanya penurunan anggaran transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, tujuan dana perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah

### **1.1.3. Perkembangan PDRB di Kabupaten Bungo**

Adapun perkembangan PDRB di Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

**Tabel 5.3. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bungo Tahun 2004-2019**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (Milyar Rupiah)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2004	6.599,00	-
2005	6.758,00	2,35
2006	7.015,00	3,66

2007	7.320,00	4,17
2008	7.704,00	4,98
2009	8.208,00	6,14
2010	8.983,00	8,63
2011	9.208,00	2,44
2012	9.630,00	4,38
2013	10.676,00	4,80
2014	11.809,00	4,59
2015	12.986,00	4,97
2016	14.371,00	4,64
2017	16.023,00	5,31
2018	17.303,25	7,40
2019	17.917,63	3,43
Rata-Rata	10.781,93	4,79

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan BPS Kabupaten Bungo (2019)

Tabel 5.3. menunjukkan bahwa selama tahun 2004-2019 rata-rata PDRB Kabupaten Bungo sebesar Rp.10.781,93 dengan rata-rata perkembangan sebesar 4,79%. Tahun 2004 sampai 2005 PDRB Kabupaten Bungo mengalami perkembangan sebesar 2,35% dan tahun 2006 meningkat sebesar 3,66%. Tetapi di tahun 2007 PDRB Kabupaten Bungo mengalami penurunan sebesar 4,17%.

Penurunan tersebut tidak berlangsung lama karena di tahun 2008 PDRB Kabupaten Bungo kembali meningkat sebesar 4,98%. PDRB Kabupaten Bungo mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2010 dengan perkembangan sebesar 8,63%. Perkembangan ini sangat tinggi sekali dibanding tahun sebelumnya maupun tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini diduga karena pada tahun tersebut Kabupaten Bungo dapat memanfaatkan potensi seperti potensi pertambangan batubara dan emas serta potensi di subsektor perkebunan yang menyebabkan pendapatan domestik juga tinggi.

Tahun berikutnya yaitu tahun 2011 PDRB Kabupaten Bungo hanya mengalami perkembangan sebesar 2,44% dan perkembangan PDRB Kabupaten Bungo cenderung meningkat sampai tahun 2019 dengan perkembangan sebesar 3,43%. PDRB yang terus meningkat tentu

memberikan keuntungan bagi Kabupaten Bungo, karena PDRB yang meningkat tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Bungo dalam keadaan baik. Selain itu, peningkatan PDRB di Kabupaten Bungo juga menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Bungo sudah berjalan dengan baik.

#### 1.1.4. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bungo

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 dapat dilihat pada Tabel 5.4. berikut ini.

**Tabel 5.4. Perkembangan Penduduk Kabupaten Bungo Tahun 2004-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)
2004	246.968	-
2005	242.355	-1,87
2006	250.934	3,54
2007	257.087	2,45
2008	264.389	2,84
2009	271.565	2,71
2010	304.833	12,25
2011	312.695	2,58
2012	320.627	2,54
2013	328.375	2,42
2014	336.320	2,42
2015	344.100	2,31
2016	351.878	2,26
2017	359.590	2,19
2018	367.182	2,11
2019	374.337	1,95
Rata-Rata	308.327	2,85

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (2019)

Tabel 5.4. menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk di Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 adalah 308.327 jiwa dengan rata-rata perkembangan sebesar 2,85%. Jumlah

penduduk di Kabupaten Bungo mengalami perkembangan yang terus meningkat, meskipun peningkatannya cenderung stabil. Tahun 2004 jumlah penduduk di Kabupaten Bungo sebanyak 246.968 jiwa dan sempat mengalami penurunan sebesar 1,87% sehingga jumlahnya hanya 242.355% pada tahun 2005.

Selanjutnya tahun 2006 sampai tahun-tahun berikutnya jumlah penduduk di Kabupaten Bungo terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan tertinggi ada pada tahun 2010 yaitu 12,25% sehingga jumlah penduduk di Kabupaten Bungo menjadi 304.833 jiwa dari tahun sebelumnya hanya 271.565 jiwa. Tahun 2011 sampai tahun 2019 perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bungo terus meningkat secara bertahap sampai di tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Bungo sebanyak 374.337 jiwa.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bungo yang terus meningkat diduga karena tingginya angka kelahiran dan menurunnya angka kematian yang disebabkan oleh peningkatan perkembangan dalam bidang kesehatan medis. Hal ini sesuai pendapat Suartha (2016) bahwa beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan penduduk disuatu wilayah adalah jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang cepat, penyebaran penduduk yang tidak merata, banyaknya yang menikah dini, menurunnya angka kematian dan banyaknya penduduk yang melkaukan urbanisasi.

#### **1.1.5. Perkembangan IPM Kabupaten Bungo**

Rata-rata IPM di Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 sebesar 68,71% dengan rata-rata perkembangan sebesar 0,20%. IPM di Kabupaten Bungo setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan yang meningkat. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5. Perkembangan IPM Kabupaten Bungo Tahun 2004-2019**

<b>Tahun</b>	<b>IPM (%)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2004	68,00	-
2005	68,80	1,18
2006	69,50	1,02
2007	70,00	0,72
2008	70,67	0,96
2009	71,34	0,95
2010	66,28	-7,09
2011	66,70	0,63
2012	67,20	0,75
2013	67,54	0,51
2014	67,93	0,58
2015	68,34	0,60
2016	68,77	0,63
2017	69,04	0,39
2018	69,42	0,55
2019	69,86	0,63
Rata-Rata	68,71	0,20

*Sumber : BPS Kabupaten Bungo (2019)*

Tabel 5.5. menunjukkan bahwa tahun 2004 sampai 2009 IPM di Kabupaten Bungo mengalami perkembangan sebesar 1,18%. Perkembangan ini terus terjadi sampai tahun 2009 dengan angka perkembangan sebesar 0,95%. Akan tetapi tahun 2010 IPM di Kabupaten Bungo justru mengalami penurunan sebesar 7,09%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2004-2009 perhitungan IPM masih menggunakan metode lama, sedangkan pada tahun 2010-2019 perhitungan IPM sudah menggunakan metode perhitungan baru. Tahun 2004-2009 komponen perhitungan IPM meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, kombinasi angka partisipasi

kasar dan PDB perkapita, sedangkan komponen perhitungan IPM tahun 2010 meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan PNB perkapita dengan menggunakan rata-rata geometric.

Tahun 2011 IPM di Kabupaten Bungo kembali mengalami peningkatan sebesar 0,63% sampai di tahun 2019 IPM di Kabupaten Bungo mengalami peningkatan sebesar 0,63%. Peningkatan IPM di Kabupaten Bungo ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Bungo dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Sehingga pembangunan manusia yang dimaksudkan adalah suatu proses memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Antara lain yang terpenting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, pilihan untuk berilmu, pilihan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pembangunan manusia merupakan perwujudan pembangunan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan disekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan (Soleha, 2016).

#### **1.1.6. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bungo**

Adapun perkembangan belanja daerah di Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 sebagai berikut.

**Tabel 5.6. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2004-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Daerah (Ribu Rp)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2004	210.895.003	-
2005	232.332.699	10,17
2006	326.360.078	40,47
2007	563.432.028	72,64
2008	680.186.956	20,72
2009	622.100.727	-8,54
2010	674.259.918	8,38
2011	744.999.647	10,49
2012	833.136.949	11,83
2013	1.051.265.834	26,18
2014	1.030.543.849	-1,97
2015	1.094.777.965	6,23
2016	1.089.477.250	-0,48
2017	1.190.415.102	9,26
2018	1.300.672.948	9,26
2019	1.337.987.498	2,87
Rata-Rata	811.427.778	14,50

*Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bungo (2019)*

Tabel 5.6. Menunjukkan bahwa rata-rata belanja daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 sebesar Rp.811.427.778 dengan rata-rata perkembangan sebesar 14,50%. Tahun 2004 sampai 2005 belanja daerah Kabupaten Bungo mengalami perkembangan sebesar 10,17%. Bahkan tahun 2007 belanja daerah Kabupaten Bungo mengalami perkembangan yang cukup tinggi yaitu 72,645.

Tahun 2008 belanja daerah Kabupaten Bungo juga mengalami peningkatan tetapi perkembangannya tidak setinggi tahun sebelumnya. Tahun 2009 belanja daerah Kabupaten Bungo mengalami penurunan sebesar 8,54% dan tahun 2010 kembali meningkat sebesar 8,38%. Peningkatan ini terus terjadi sampai tahun 2013 dengan perkembangan sebesar 26,18%. Tahun 2014 belanja daerah Kabupaten Bungo kembali menurun sebesar 1,97% dan tahun 2015 meningkat kembali. Tahun 2016 belanja daerah Kabupaten Bungo kembali menurun sebesar

0,48%. Tetapi pada tahun 2017 sampai 2019 belanja daerah Kabupaten Bungo terus meningkat sebesar 22,87%.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Halim, 2014).

## **1.2. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, PDRB, Jumlah Penduduk dan IPM terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019**

Untuk mengetahui pengaruh PAD, Dana Perimbangan, PDRB, jumlah penduduk dan IPM terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 dilakukan analisis regresi linear berganda dengan hasil sebagai berikut.

**Tabel 5.7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.680172	1.452644	3.221830	0.0091
JML Penduduk (X1)	-0.603784	0.245086	-2.463564	0.0335
PAD (X2)	0.135086	0.093967	1.437592	0.0181
Dana Perimbangan (X3)	1.471620	0.202589	7.264056	0.0000

PDRB (X4)	-0.209006	0.066031	-3.165296	0.0101
IPM (X5)	-0.029366	0.012338	-2.380068	0.0386
R-squared	0.986937	Mean dependent var		11.85125
Adjusted R-squared	0.980405	S.D. dependent var		0.254581
S.E. of regression	0.035637	Akaike info criterion		-3.550889
Sum squared resid	0.012700	Schwarz criterion		-3.261168
Log likelihood	34.40711	Hannan-Quinn criter.		-3.536053
F-statistic	151.1021	Durbin-Watson stat		1.954502
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olahan Data (2021)

Berdasarkan Tabel 5.7. maka persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Log Y} = 4,680172 - 0,603784 \text{LogX}_1 + 0,135086 \text{LogX}_2 + 1,471620 \text{LogX}_3 - 0,209006 \text{LogX}_4 - 0,029366 \text{X}_5$$

Selanjutnya interpretasi dari persamaan tersebut sebagai berikut:

1. Konstanta memiliki nilai koefisien regresi sebesar 4,680172, artinya jika jumlah penduduk, PAD, dana perimbangan, PDRB dan IPM naik maka belanja daerah Kabupaten Bungo akan meningkat sebesar 4,680172%.
2. Jumlah penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,603784, artinya jika jumlah penduduk naik sebesar 1% maka belanja daerah Kabupaten Bungo akan menurun sebesar 0,603784%.
3. PAD memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,135086, artinya PAD naik sebesar 1% maka belanja daerah Kabupaten Bungo akan meningkat sebesar 0,135086%.
4. Dana perimbangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,471620, artinya jika dana perimbangan naik sebesar 15 maka belanja daerah Kabupaten Bungo akan meningkat sebesar 1,471620%.
5. PDRB memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,209006, artinya jika PDRB naik sebesar 1% maka belanja daerah Kabupaten Bungo akan menurun sebesar 0,209006%.
6. IPM memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,029366, artinya jika IPM naik sebesar 1% maka belanja daerah Kabupaten Bungo akan menurun sebesar 0,029366%.

## **1.2.1. Uji Hipotesis**

### **1.2.1.1. Uji Signifikansi Statistik secara Simultan (Uji F)**

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari PAD, Dana Perimbangan, PDRB, jumlah penduduk dan IPM secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah Kabupaten Bungo. Berdasarkan hasil regresi simultan diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 151,1021 sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,33 pada taraf  $\alpha = 5\%$  dengan derajat kebebasan ( $df = n - k$ ) sebesar 10.

Hal ini menunjukkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $151,1021 > 3,33$  yang artinya PAD, Dana Perimbangan, PDRB, jumlah penduduk dan IPM secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo.

### **1.2.1.2. Uji Signifikansi Statistik secara Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk menganalisis hipotesis secara parsial atau secara individu guna mengetahui seberapa besar signifikan atau tidak signifikan pengaruh dari masing-masing variabel. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan besaran signifikansi pada taraf  $\alpha = 5\%$ . Adapun hasil dari uji t parsial sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0335 ( $P < 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo.
2. PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0181 ( $P < 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo.

3. Dana perimbangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000 ( $P < 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo.
4. PDRB memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0101 ( $P < 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo.
5. IPM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0386 ( $P < 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya IPM berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo.

### **1.2.2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  dalam penelitian ini sebesar 0,986937. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 98,6937% belanja daerah di Kabupaten Bungo dipengaruhi oleh jumlah penduduk, PAD, dana perimbangan, PDRB dan IPM. Sedangkan 11,3063% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di amati dalam penelitian ini.

### **1.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik**

#### **1.2.3.1. Uji Multikolinearitas**

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel jumlah penduduk sebesar 3,19757, nilai VIF variabel PAD sebesar 2,06817, variabel dana perimbangan sebesar 3,08888, PDRB memiliki nilai VIF sebesar 3,06077 dan IPM sebesar 4,86303. Hal ini menunjukkan bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel kurang dari 10, sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas atau tidak mengandung korelasi antara variabel dependen.

### **1.2.3.2. Uji Heterokedasitas**

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedasitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey* dengan nilai probability  $F_{hitung} > \alpha=5\%$  maka tidak terindikasi adanya gejala heterokedasitas.

Hasil dari uji heterokedasitas menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 0,509302 ( $F_{hitung} > \alpha=5\%$ ) sehingga model regresi dalam penelitian ini tidak terindikasi adanya gejala heterokedasitas dan persamaannya valid untuk digunakan.

### **1.2.3.3. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan dalam penelitian ini karena data dalam penelitian ini merupakan data timeseries. Nilai probability yang digunakan dalam uji autokorelasi adalah  $F_{hitung} > \alpha=5\%$  maka tidak terindikasi adanya gejala autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0,829194 sehingga  $F_{hitung} > \alpha=5\%$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terindikasi adanya gejala autokorelasi.

### **1.2.3.4. Uji Normalitas**

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis berbentuk sebaran normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Jarque-Bera test. Jika nilai  $JB_{hitung}$  dan probability  $> \alpha=5\%$  maka persamaan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai  $JB_{hitung}$  sebesar 0,482665 dan nilai probability sebesar 0,785581  $> \alpha=5\%$  sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal an asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi.

## **1.3. Analisis Ekonomi**

### **1.3.1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo. Jika jumlah penduduk naik, maka belanja daerah akan menurun. Hal ini diduga karena semakin tinggi jumlah penduduk, maka kesejahteraan penduduk akan terganggu yang berakibat pada berkurangnya pendapatan daerah. Jika pendapatan daerah menurun maka belanja daerah juga akan menurun.

Menurut Sasana (2011) Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah. Karena tingginya pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang mengakibatkan kesejahteraan penduduk menjadi terganggu. Bila kenaikan penduduk lebih besar dari pada pertumbuhan ekonomi, maka kesejahteraan penduduk akan semakin kecil artinya terjadi pengurangan jumlah pendapatan per kapita.

### **1.3.2. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo**

Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo. Hal ini diduga karena ketika PAD Kabupaten Bungo tinggi, maka kemampuan pemerintah Kabupaten Tebo untuk melakukan belanja daerah juga semakin tinggi.

Menurut Astuti (2017) besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan besarnya belanja modal, maka harus menggali PAD yang besar. Sehingga peningkatan PAD diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal oleh pemerintah daerah

### **1.3.3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo**

Hasil analisis menunjukkan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah, dimana jika dana perimbangan naik maka belanja daerah juga akan meningkat. Menurut Wati dan Fajar (2017) dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah yang bersifat bantuan tau dapat dikatakan dana yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan kebalikan dari besarnya rasio penerimaan transfer di dalam pemenuhan pembelanjaan pemerintah. Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat (Abdullah dan Halim, 2013). Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Sasana, 2011).

### **1.3.4. Pengaruh PDRB Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo**

Berdasarkan hasil analisis, PDRB memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo. Hal ini diduga karena ketika PDRB tinggi maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo juga akan tinggi sehingga pemerintah memiliki alokasi yang cukup untuk melakukan belanja daerah guna mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Bungo.

Menurut Prakoso (2010) adanya pengaruh yang positif dan signifikan ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat berpengaruh pada peningkatan belanja daerah. anggaran belanja daerah mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat dioptimalkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah pada masing-masing kabupaten / kota untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dari hasil ini tentunya pemerintah daerah dapat menetapkan anggaran belanja daerah untuk optimalisasi fungsi

dan manfaat belanja daerah serta pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat.

### **1.3.5. Pengaruh IPM Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo**

Hasil analisis menunjukkan bahwa IPM berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo. Hal ini diduga karena saat ini pemerintah Kabupaten Bungo lebih memfokuskan belanja daerah pada sektor pelayanan publik dibanding sektor pendidikan sehingga IPM belum dapat meningkat optimal. Hal ini dikarenakan IPM berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bungo terutama dari segi pengeluaran, pendidikan dan kesehatan.

Meskipun demikian, bukan berarti IPM tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. IPM memberikan pengaruh terhadap belanja daerah dikarenakan belanja daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Badrudin dan Khasanah (2011) IPM memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja daerah. Peran Belanja Daerah terlihat dalam mengalokasikan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur/ prasarana (misalnya pembangunan jalan, bendungan, dan lainnya), penyediaan layanan umum seperti kesehatan dan pendidikan, serta dana hibah dan bantuan sosial kepada berbagai pihak. Pembangunan infrastruktur akan mempekerjakan banyak tenaga kerja, yang diberikan pendapatan sebagian dari padanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian akan diikuti oleh

kenaikan tingkat konsumsi. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong peningkatan produksi, dan dampak multiple effect ini akan semakin meningkat dan berkelanjutan, maka hasilnya dapat dilihat kemudian adalah pengangguran dapat diatasi, kemiskinan diturunkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

#### **1.4. Implikasi Hasil Penelitian**

Belanja daerah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo untuk dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bungo yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam ba gian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah di Kabupaten Bungo yang meningkat juga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Tujuan dari adanya belanj daerah ini adalah mencapai kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bungo secara adil dan merata. Akan tetapi, belanja daerah tidak begitu saja bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bungo, tapi tentu ada faktor yang mempengaruhi, seperti jumlah penduduk, PAD, dana perimbangan, PDRB dan IPM.

Jumlah penduduk yang semakin meningkat tentu akan mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Bungo. Hal ini dikarenakan ertumbuhan ekonomi tidak lepas dari penduduk sebagai bagian penting penggerak perekonomian. Penduduk dalam konteks pasar berada pada sisi permintaan maupun penawaran. Pada sisi permintaan penduduk adalah konsumen, sumber permintaan barang dan jasa, sedangkan di sisi penawaran penduduk adalah produsen jika ia sebagai pengusaha, pedagang, atau tenaga kerja. Dalam konteks pembangunan pandangan

penduduk terpecah dua ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan dan ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan.

Pertumbuhan penduduk tinggi akan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk yang tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Artinya semakin besar jumlah penduduk yang diiringi dengan investasi lebih dalam pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) akan mengakibatkan banyak bermunculan ide-ide gagasan baru dan tenaga ahli, dengan demikian akan semakin berkembang teknologi. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan dalam pembangunan ekonomi yang akan mempengaruhi belanja daerah pula.

Selain jumlah penduduk, PAD juga berperan dalam besar kecilnya belanja daerah di Kabupaten Bungo. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan perkapita yang lebih baik. Apabila suatu daerah PADnya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat pula.

Dana perimbangan menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Dana perimbangan digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal. Transfer dengan syarat (khusus) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai

layanan tertentu, seperti pendidikan dasar, pelayanan sosial dan jalan. Transfer dana perimbangan digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan horizontal antar pemerintah daerah

Tinggi rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat berpengaruh pada peningkatan belanja daerah. anggaran belanja daerah mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat dioptimalkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah pada masing-masing kabupaten / kota untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dari hasil ini tentunya pemerintah daerah dapat menetapkan anggaran belanja daerah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat belanja daerah serta pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat.

Belanja daerah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk daerah/regional. Tingginya angka belanja daerah pada suatu daerah serta pengalokasian belanja daerah yang tepat dan adil secara merata oleh pemerintah seharusnya dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerah tersebut khususnya dalam pengalokasian belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang memiliki pengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia.